Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT GANTO NAGARI SEMBILAN BELAS LIMA EMPAT

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

798475-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601220-31012025112415

Periode Data

S2 2024

User ID Petugas Pelaporan

bankganto@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 11:24:15

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BPR Ganto Nagari 1954
Jl. Jend. Sudirman No. 22 Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman
Telp. (0751) 96156 Fax. (0751) 697510

Lubuk Alung, 18 Juli 2025

Nomor	:	03. 21/BPR- GN/07-2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Perihal	:	Pelaksanaan dan Sel Assesment Tata Kelola (GCG) tahun 2024 PT BPR Ganto Nagari 1954 melalui PERBARINDO dan Majalah Media BPR

Kepada Yth.
Ketua Umum DPP Perbarindo dan Media BPR
JL. Jend Ahmad Yani By Pas Cempaka Putih
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Menunjuk POJK No. 04/POJK.03/2015 dan SEOJK No.12/SEOJK.03/2024 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR. Serta sehubungan telah terbitnya POJK 23 tahun 2024 (POJK Pelaporan dan TKK BPR BPRS) dan SEOJK 16 dan 17 tahun 2024 (pedoman laporan BPR/S) maka untuk laporan tata kelola periode Desember 2024 tidak dilaporkan pada modul laporan Tata Kelola melainkan pada modul laporan Profil Resiko form 00.001 (Dokumen pendukung)

Bersamaan dengan hal tersebut Dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan laporan kepada Asosiasi (PERBARINDO) dan satu kantor Media . Menindaklanjuti ketentuan diatas bersama ini kami PT BPR Ganto Nagari 1954 mengirimkan

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Ganto Nagari 1954 posisi Desember 2024
2. Self Assesment (Penilaian Sendiri) Penerapan Tata Kelola PT BPR Ganto Nagari 1954 posisi Desember 2024
3. Bukti Kirim Laporan ke OJK

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kebijakan Bapak/Ibu di ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR Ganto Nagari 1954

ALHIAN, SE
Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
GANTO NAGARI 1954

LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA BPR SEMESTER II TAHUN 2024

==========

Laporan ini disusun dengan berpedoman pada: POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 perihal "Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi BPR", serta SE OJK No. 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

DAFTAR ISI

		halaman
KATA PENGANTAR		
DAFTAR TABEL		
BAB I	**PENJELASAN UMUM**	
	A. Latar Belakang ……. B. Dasar Penyusunan …… C. Prinsip-Prinsip Tata Kelola …….. D. Struktur Tata Kelola BPR Ganto Nagari 1954.....	
BAB II	**TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA**	
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Direksi 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Dewan Komisaris **B. Kemilikan Saham Direksi** 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain **C. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham** **D. Kemilikan Saham Dewan Komisaris** 1. Kepemilihan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR 2. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris pada Perusahaan Lain **E. Hubungan Keuangan dan atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan atau Pemegang Saham** **F. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS** **G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah** **H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris** **I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)** **J. Jumlah Permasalahan Hukum Yang Dihadapi** **K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan** **L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politif**	
BAB III	**PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)**	
	A. **Hasil Penilaian Sendiri (Self Asesment)** B. **Kesimpulan Umum Hasil Penerapan Tata Kelola**	

PT BPR GANTO NAGARI 1954
Jalan Jendral Sudirman No 22 Lubuk Alung Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumbar
Telepon: 081363435851

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Nama BPR : PT BPR GANTO NAGARI 1954
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No 22 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumbar
Nomor Telepon : 081363435851
Posisi Laporan : Tahun 2024
Modal Inti : Rp5.273.936.562
Total Aset : Rp33.300.089.710

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik
Kesimpulan		

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan.
4. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
8. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR dinilai memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini dinilai memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan pencapaian memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
2. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian sebagian.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian masih terpenuhi sebagian sebagian.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, yaitu Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Nihil

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Nihil

Lubuk Alung, 24 Januari 2025

PT BPR GANTO NAGARI 1954

Disiapkan Oleh	Disetujui Oleh
ALFIAN, SE	ZUARNI OEMAR
Direktur Utama	Komisaris Utama

PT BPR GANTO NAGARI 1954
Jalan Jendral Sudirman No 22 Lubuk Alung Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumbar
Telepon: 081363435851

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR GANTO NAGARI 1954 Tahun 2024

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR GANTO NAGARI 1954 selama tahun 2024. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Lubuk Alung, 24 Januari 2025

PT BPR GANTO NAGARI 1954

Disiapkan Oleh	Disetujui Oleh
P.T. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DIREKSI GANTO NAGARI 1954	P.T. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DEWAN KOMISARIS GANTO NAGARI 1954
ALFIAN, SE	**ZUARNI OEMAR**
Direktur Utama	Komisaris Utama

PT BPR GANTO NAGARI 1954
Jalan Jendral Sudirman No 22 Lubuk Alung Kabupaten
Padang Pariaman Provinsi Sumbar
Telepon: 081363435851

KERTAS KERJA LAPORAN
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*Implementasi indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi.*
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dinilai baik.*
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik.*
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	***Cukup Baik***	*Indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.*

6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, dinilai baik.*
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik.*
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik.*

11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang- undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi telah terpenuhi. 2. BPR memiliki indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, indikator Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, yang dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dinilai baik. 2. Indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris, dinilai baik. 3. Indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR indikator Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dinilai baik.

	4. Penilaian terhadap indikator Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, pada BPR saat ini dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi, pada BPR berada dalam kondisi baik. 2. Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Indikator Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai baik. 4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi.*
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.*
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*

6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	***Telah Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan pencapaian telah terpenuhi.*
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sebagian Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.*
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, BPR tergolong baik.*

11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik.*
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain, dengan penilaian baik.*
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	***Baik***	*Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik.*
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Cukup Baik***	*Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik.*
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan penilaian baik.*

16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Sangat Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, BPR tergolong sangat baik.*
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian baik.*
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, BPR tergolong baik.*
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR, berjalan dengan baik.*
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik.*

21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, BPR tergolong baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik.*
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR adalah baik.*
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, BPR tergolong baik.*
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan pencapaian baik.*
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai baik.*

28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**8 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Sebagian**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**16 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. c. Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 2. Indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai telah terpenuhi. 3. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 5. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi. 6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi, dengan pencapaian telah terpenuhi.

	7. Indikator Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 8. Penilaian terhadap indikator Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Penilaian terhadap indikator Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati- hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi, BPR tergolong baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi, BPR tergolong baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain, dengan penilaian baik. 4. Indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, pada BPR indikator Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris, dinilai baik. 5. Implementasi indikator Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, di BPR menunjukkan kondisi cukup baik. 6. BPR telah mengimplementasikan indikator Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan penilaian baik. 7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, BPR tergolong sangat baik. 8. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan pencapaian baik. 9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai, BPR tergolong baik. 10. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR, berjalan dengan baik.

	11. Penilaian terhadap indikator Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, yang dimiliki BPR adalah baik. 12. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten, yang dimiliki BPR dinilai baik. 13. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR, BPR tergolong baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, dengan penilaian baik. 2. Penilaian terhadap indikator Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, yang dimiliki BPR adalah baik. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, BPR tergolong baik. 4. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, dengan pencapaian baik. 5. Indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, pada BPR saat ini dinilai baik. 6. BPR telah mengimplementasikan indikator Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dengan penilaian sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi.*
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.*
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen*

7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	***Sebagian Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sebagian terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, di BPR menunjukkan kondisi baik.*

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	***Sangat Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.*
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, berjalan dengan baik.*
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	***Sangat Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, dengan penilaian sangat baik.*
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik.*
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	***Sangat Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai sangat baik.*

16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.*
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	***Sangat Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR dinilai sangat baik.*
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik.*
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik.*
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	***Sangat Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.*
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai sangat baik.*
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**6 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Sebagian**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**7 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**11 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk pengambilan keputusan berjalan dengan baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. c. Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. d. Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan kebijakan remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan kebijakan remunerasi dan nominasi.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	

1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan pencapaian telah terpenuhi. 3. Indikator Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi. 4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 6. BPR tidak menilai indikator Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen 7. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR dinilai sebagian terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati- hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Implementasi indikator Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 4. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang- undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan, berjalan dengan baik.

	5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR, dengan penilaian sangat baik. 6. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, indikator Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten, yang dinilai baik. 7. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR dinilai sangat baik. 8. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah sangat baik. 9. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, pada BPR dinilai sangat baik. 10. Penilaian terhadap indikator Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah baik. 11. Implementasi indikator Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, di BPR menunjukkan kondisi baik. 12. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, dengan penilaian baik. 13. BPR telah mengimplementasikan indikator Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, indikator Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS, yang dinilai baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, yang dimiliki BPR dinilai baik. 4. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Dewan Komisaris menyampaikan laporan- laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai sangat baik.

	5. Penilaian terhadap indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Tidak ada penilaian untuk faktor ini.

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	***Sangat Baik***	*Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	***Sangat Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.*
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, berjalan dengan baik.*
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR dinilai baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi, dengan penilaian telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, pada BPR saat ini dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik, berjalan dengan baik. 3. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Telah Terpenuhi***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi.*
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			

5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	***Cukup Baik***	*Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dinilai cukup baik.*
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	***Baik***	*Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi baik.*
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, BPR tergolong baik.*
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong sangat baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
		Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/ atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi

	persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 3. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, berjalan dengan telah terpenuhi. 4. Penilaian terhadap indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, yang dimiliki BPR adalah telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. BPR telah mengimplementasikan indikator Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dengan penilaian baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, pada BPR indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini, dinilai cukup baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, BPR tergolong baik. 2. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dinilai telah terpenuhi.*
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	***Sebagian Terpenuhi***	*Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, pada BPR indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, dinilai sebagian terpenuhi.*
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dinilai telah terpenuhi.*
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*

5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan pencapaian baik.*
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	***Tidak Dinilai***	*BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern*
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	***Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR dinilai baik.*
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.*

11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu.	***Baik***	*Implementasi indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Sebagian**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	**5 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi. 2. BPR memiliki indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris, yang dinilai telah terpenuhi. 3. Indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, pada BPR indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional, dinilai telah terpenuhi. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi. 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, pada BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa

	Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, dengan pencapaian baik. 2. Indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dinilai baik. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit, yang dimiliki BPR dinilai baik. 4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern, pada BPR berada dalam kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. 2. Implementasi indikator BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	***Sangat Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai sangat baik.*
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*Implementasi indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	***Sangat Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan pencapaian sangat baik.*
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**4 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 1 (Sangat Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 1 (Sangat Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai, pada BPR dinilai telah terpenuhi.

2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit), pada BPR dinilai sangat baik. 2. Implementasi indikator BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, dengan pencapaian sangat baik. 2. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi.*
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	***Telah Terpenuhi***	*Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, pada BPR indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.*

5	Direksi:a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR dinilai baik.*
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	***Baik***	*BPR memiliki indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dinilai baik.*

7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	***Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR berada dalam kondisi baik.*
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR dinilai baik.*
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik.*
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dimiliki BPR adalah baik.*
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik.*
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik.*
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dimiliki BPR adalah baik.*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR adalah baik.*
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik.*
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	***Sangat Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**12 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**

Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) tidak terdapat fraud; dan/ atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah. b. BPR telah memiliki dan menginikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sÏesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong telah terpenuhi. 2. Indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, pada BPR indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko, dinilai telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	

1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, pada BPR dinilai baik. 3. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, indikator Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang dinilai baik. 4. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko, pada BPR berada dalam kondisi baik. 5. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan, pada BPR dinilai baik. 6. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai baik. 7. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik. 8. Penilaian terhadap indikator BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, yang dimiliki BPR adalah baik. 9. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong baik. 10. Penilaian terhadap indikator BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh, yang dimiliki BPR adalah baik. 11. Penilaian terhadap indikator Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Penilaian terhadap indikator BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik, yang dimiliki BPR adalah baik. 2. Indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR indikator BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dinilai sangat baik. 3. BPR telah mengimplementasikan indikator BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan, dengan penilaian sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Telah Terpenuhi***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan.	***Baik***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik.*
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.	***Sangat Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, berjalan dengan sangat baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik.*

5	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Baik***	*Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.*
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:			**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:			**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:			0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:			**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:			**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:			**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:			**Nilai 2 (Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berjalan dengan telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan, dengan pencapaian baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan, berjalan dengan sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif

	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian baik. 2. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai telah terpenuhi.*
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	***Telah Terpenuhi***	*BPR memiliki indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dinilai telah terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	***Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR dinilai baik.*

5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.*
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.*
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Penilaian terhadap indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik.*
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik.*
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	***Baik***	*Penilaian terhadap indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR adalah baik.*
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			

10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	***Sangat Baik***	*Implementasi indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik.*
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik.*
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	***Sangat Baik***	*BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai sangat baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**3 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Secara Keseluruhan**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**7 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator

Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Sangat Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 1 (Sangat Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
Nilai Faktor
Nilai 1 (Sangat Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang sangat memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki dan menginikan secara berkala kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup sangat memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak terdapat laporan pengaduan dari nasabah.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, yang dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, indikator BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, yang dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, pada BPR dinilai baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. Hasil evaluasi menunjukkan indikator BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 4. Penilaian terhadap indikator BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang dimiliki BPR adalah sangat baik. 5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa indikator BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong sangat baik. 6. Penilaian terhadap indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja, yang dimiliki BPR adalah baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, di BPR menunjukkan kondisi sangat baik. 2. Hasil evaluasi menunjukkan indikator Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi sangat baik. 3. BPR memiliki indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, indikator Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu, yang dinilai sangat baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	***Telah Terpenuhi***	*Hasil evaluasi menunjukkan indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR berada dalam kondisi telah terpenuhi.*
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Telah Terpenuhi***	*Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.*
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	***Sebagian Terpenuhi***	*Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.*
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	***Baik***	*BPR telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan penilaian baik.*
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	***Baik***	*Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik.*

C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	***Sangat Baik***	*Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dengan penilaian sangat baik.*
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	***Cukup Baik***	*Penilaian terhadap indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.*

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	**Terpenuhi Sebagian**
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Baik:	**2 Indikator**
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	**1 Indikator**
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	**Baik**
Nilai Faktor yang Dipilih:	**Nilai 3 (Cukup Memadai)**

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan sebagian besar direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sebagian sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham namun pemenuhan komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur hanya dilakukan sebagian.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, pada BPR indikator Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, dinilai telah terpenuhi. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi. 3. Ditinjau dari sisi regulasi, indikator Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur, yang dimiliki BPR dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah mengimplementasikan indikator Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati- hatian; dan c. penerapan manajemen risiko, dengan penilaian baik. 2. Implementasi indikator Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR, di BPR menunjukkan kondisi baik.
2)	Faktor Negatif

	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Implementasi indikator Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, di BPR menunjukkan kondisi baik. 2. Berdasarkan hasil penilaian, indikator Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham, pada BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR GANTO NAGARI 1954 mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.

Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	*Nilai 2 (Memadai)*
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	*Nilai 2 (Memadai)*
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	*Nilai 2 (Memadai)*
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	*Tidak Dinilai*
5	Penanganan Benturan Kepentingan	*Nilai 2 (Memadai)*
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	*Nilai 2 (Memadai)*
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	*Nilai 2 (Memadai)*
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	*Nilai 2 (Memadai)*
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	*Nilai 2 (Memadai)*
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	*Nilai 1 (Sangat Memadai)*
12	Rencana Bisnis BPR	*Nilai 3 (Cukup Memadai)*
Modus Nilai Faktor		**Nilai 2**
Median Nilai Faktor		**Nilai 2**
Rata-rata Nilai Faktor		**Nilai 2.45**
Peringkat Komposit		**2**
Predikat Komposit		**Baik**

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur
1. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan. 2. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 3. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong terpenuhi secara keseluruhan. 4. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan. 5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi

Audit Ekstern dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dengan pencapaian terpenuhi secara keseluruhan.
7. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit dengan penilaian terpenuhi secara keseluruhan.
8. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dinilai memadai.
3. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR dinilai memadai.
4. Proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR saat ini dinilai memadai.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
6. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
7. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dinilai memadai.
8. Proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki BPR dinilai memadai.
11. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dengan pencapaian memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian memadai.
3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Manajemen BPR telah menilai bahwa hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan memadai.
5. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan dengan penilaian memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai memadai.
7. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR saat ini dinilai memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit yang dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan

dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR saat ini dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
2. Penilaian terhadap struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah masih terpenuhi sebagian.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian sebagian.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, yaitu Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dengan penilaian masih terpenuhi sebagian sebagian.
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi, yaitu Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

Nihil

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Nihil

PT BPR GANTO NAGARI 1954

Jalan Jendral Sudirman No 22 Pasar Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung
PADANG PARIAMAN – SUMATERA BARAT

LAPORAN POKOK-POKOK PELAKSANAAN TUGAS
DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
PT BPR GANTO NAGARI 1954
PERIODE JANUARI s/d DESEMBER 2024

BAB I
PENDAHULAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SE OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat, masing-masing menetapkan bahwa :

1. Sesuai Pasal 51 POJK Tata Kelola BPR, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan (PPATK), dan / atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

3. Dalam rangka menerapkan fungsi kepatuhan pada BPR, BPR wajib menyampaikan:
   a. laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
   b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
   c. laporan penggantian sementara jabatan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan

Sehubungan hal tersebut maka laporan pokok-pokok pelaksanaan dan hasil temuan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan ini dibuat untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS POKOK
DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan sepanjang tahun 2023 (Januari s/d Desember) mencakup sebagai berikut :

   a. Menetapkan struktur dan infra struktur pelaksana fungsi kepatuhan dan satuan kerja operasional yang melaksanakan kepatuhan, sehingga pelaksanaan kepatuhan menjadi budaya kepatuhan kepada setiap unit kerja dan jenjang organisasi maupun kepada setiap karyawan yang akhirnya pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak bersifat eklusif tetapi inklusif. Informasi umum PT BPR Ganto Nagari 1954 tentang penetapan struktur dan infra struktur pelaksanaan fungsi kepatuhan, mencakup tentang :
      1) Struktur Organisasi tentang Kedudukan Fungsi Kepatuhan
      2) Informasi Sumber Daya Manusia terkait dalam pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksana kepatuhan pada setiap unit dan jenjang organisasi.
      3) Pedoman Kebijakan dan Prosedur bersifat Strategi maupun Operasional yang dijadikan standar kerja bagian seluruh unit dan jenjang organisasi.

   b. Menetapkan, memantau, dan menjaga serta memastikan pelaksana fungsi kepatuhan sebagai pelaksana fungsi pencegahan terkait dengan :
      1) Menetapkan langkah-langkah yang perlu diperhatikan kepada semua unit kerja atau jenjang organisasi agar tidak terjadi penyimpangan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain termasuk SOP yang dijadikan standar kerja apabila pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
      2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha /operasional BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang- undangan, dengan melibatkan Pejabat Koordinator Penanggung Jawab Risiko Kepatuhan dan Pemilik Risiko Perkreditan, Pemilik Risiko Operasional dan Jasa Layanan BPR serta melakukan koordinasi / komunikasi dengan pelaksana fungsi audit intern.
      3) Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh PT BPR Ganto Nagari 1954 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain dengan melibatkan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.
      4) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dengan melibatkan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Pemilik Risiko Kepatuhan Perkreditan, Pemilik Risiko Operasional dan Jasa Layanan BPR

2. Ruang Lingkup Pokok- Pokok Pelaksanaan Tugas Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
   a. Realisasi Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan selama tahun 2024 terhadap :
      1) Informasi umum PT BPR Ganto Nagari 1954 tentang penetapan struktur dan infrastruktur pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksanaan kepatuhan.

2) Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPR Ganto Nagari 1954 :
   1. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja dan jenjang organisasi pada PT BPR Ganto Nagari 1954.
   2. Memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
   3. Mamantau dan menjaga pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.
   4. Memastikan tentang pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan.

b. Tujuan, Ruang Lingkup dan Pendekatan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada PT BPR Ganto Nagari 1954 :

   1) Tujuan Pelaksanaan Tugas Direksi, adalah sebagai fungsi pencegahan untuk :
      - memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta
      - memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

   2) Ruang lingkup Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah melaksanakan fungsi pencegahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SE OJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

   3) Pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilakukan sepanjang tahun 2024 (Januari s/d Desember).

c. Pendekatan Pelaksanaan Tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan :
   Teknik evaluasi untuk memastikan, memantau dan menetapkan berupa I/O/T (Interview, Observasi, Test) dengan pengawasan normal melalui pendekatan pengawasan langsung (aktif) *seperti* melakukan analisis dan menindaklajuti ke semua unit kerja atas laporan dari Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan pendekatan pengawasan tidak langsung (pasif), seperti menerima laporan hasil tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

Pelaksanaan tugas pokok Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, sekaligus penerapan SOP Kepatuhan yang ditetapkan Direksi PT Ganto Nagari 1954 No. 05/SK-DIR/03-2017 yang mengacu kepada POJK NO. 4/POJK 03/2015 dan SE OJK No. 6/SE OJK 03/2016

BAB III
POKOK-POKOK LAPORAN DAN TEMUAN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

Dari pokok-pokok laporan dan temuan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, adalah sebagai berikut :

Informasi umum PT BPR Ganto Nagari 1954 tentang Penerapan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan, adalah sebagai berikut :

1. Informasi umum PT BPR Ganto Nagari 1954 tentang Penerapan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan selama tahun 2024, diperoleh ini komposit 1,8 dengan Predikat Komposit Baik.

   Kemudian apabila dilihat secara rincian pelaksanaan Tata Kelola Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

   a) Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Fungsi Kepatuhan BPR Ganto Nagari 1954 telah memadai sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

   b) Proses Tata Kelola Fungsi Kepatuhan.

      Proses tata kelola atas struktur dan infrastruktur telah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan OJK. Hal ini sebagian besar karena *human error* dan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang belum efektif.

   c) Hasil Tata Kelola Fungsi Kepatuhan
      Laporan transparansi sangat memadai, kepatuhan terhadap peraturan telah dilaksanakan dengan baik dan permasalahan yang terjadi telah ditindaklanjuti dengan baik.

2. Informasi terkait Struktur Organisasi dan Formasi SDM PT BPR Ganto Nagari 1954 sebagai berikut :

   - Dewan Komisaris seharusnya minimal 2 orang, dan saat ini PT BPR Ganto Nagari 1954 sudah memenuhi syarat tersebut.
   - Direksi seharusnya minimal 2 orang, dan saat ini PT. BPR Ganto Nagari 1954 sudah memenuhi syarat tersebut.
   - Struktur Organisasi yang telah ditetapkan PT BPR Ganto Nagari 1954, nampak pada (*Lampiran I)* :

     Berdasarkan Struktur Organisasi dan kondisi kedudukan pelaksanaan fungsi kepatuhan di atas, telah sesuai dengan POJK NO. 4/POJK 03/2015 dan SE OJK No. 6/SE OJK 03/2016. Terkait dengan kedudukan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, BPR melalui Surat Keputusan Direksi No. 10/SK-DIR/02-2018 telah menetapkan bahwa Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan dirangkapkan sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dengan nama PE Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko dan sudah mendapat persetujuan dari OJK.

   - Informasi Sumber Daya Manusia yang sebagai pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksana kepatuhan di PT BPR Ganto Nagari 1954 adalah sebagai berikut :

Informasi SDM PT BPR GANTO NAGARI 1954
Periode : 31 Desember 2024

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah (orang)	Nama/Jabatan	Pendidikan	Lama Jabatan
1	Komisaris	2	Zuarni Oemar/Komut Jhon Maferdi/Komisaris	S2,Konsentrasi Manajemen D3,Akademi	4 tahun 8 bulan 4 tahun 8 bulan
2	Direksi	2	Alfian/Direktur Utama Burhanudin/Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan MR	S1,Jurusan Manajemen S1	4 tahun 8 bulan 3 tahun
3	Pejabat Eksekutif/Kepala Bidang	5	Soni Sugito/Kabag. Kredit Liswarni/Internal audit Edlina Jasman, /PE Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Ernaleni/Kabag. Dana Delvia Susanti/Kabag. Operasional, Umum dan SDM	SLTA SLTA S1,Jurusan Ekonomi SLTA S1, Jurusan Ekonomi	22 bulan 9 tahun 22 bulan 22 bulan 22 bulan
4	Unit Ops, Umum dan SDM	2	Puji Ramadhani/Pelayanan Kantor Aditia P/Marketing Dana Lucy Elia Melda/ Sie. Adm Umum dan Pembukuan	SLTA SLTA S1	8 tahun 18 bulan 22 bulan

5	Unit Dana dan Pemasaran	9	Desliwar/Kepala K. kas KT	SLTA	22 bulan
			Rizki Ferdianto/Kepala K.Kas PK	SLTA	22 bulan
			Silvani Rahman/Kepala K.kas PU	S1	6 tahun
			Raditia Utama/Pemasaran	S1	5 tahun
			Revika Rustin/ Pemasaran	S1	3 tahun
			Herik Praharbama	SLTA	22 bulan
			Yuliana/Teller Kantor Induk	SLTA	5 Tahun
			Rina Herlina/Teller Kantor Kas	DIII	6 tahun
			Yollanda Yonindra//Teller Kantor Kas	DIII	5 tahun 2 bulan
			Anggia Safitri/ Teller Kantor Kas	S1	3 tahun 6 bulan
6	Unit Kredit	11	Rikhi Afdal/Adm Kredit	SLTA	6 tahun
			Rolli Ariatama/AO	S1	5 tahun 6 bulan
			Alex Anggara/AO	SLTA	5 tahun 8 bulan
			Roberto Rizal/Penagihan Kredit	S1, Jurusan Pendidikan	5 tahun 3 bulan
			Mandra Fatri Ade /Taksasi dan Legal	S1, Jurusan Pendidikan	6 tahun
			Yudhi Primana /Penagihan Kredit	S1,Jurusan Hukum	5 tahun 3 bulan
			Mustapa Kamal /Penagihan Kredit	DIII	5 tahun 6 bulan
			Wendri /Penagihan	S1,Jurusan	5 tahun 6 bulan

			Kredit	Manajemen	

- Pedoman Kebijakan dan Prosedur bersifat Strategi maupun SOP bersifat Operasional yang dijadikan standar kerja bagian seluruh unit dan jenjang organisasi, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KETENTUAN, KEBIJAKAN DAN SOP	TANGGAL PEMBERLAKUAN
1	SOP FUNGSI KEPATUHAN	16 Maret 2017
2	SOP TELLER	12 Juli 2016
3	SK Direksi tentang Penempatan Dana Antar Bank dan Batasan Maksimum Uang Kas dalam Brankas	13 Maret 2014
4	SK Direksi Tentang Kebijakan Tabungan Pasif	08 Februari 2013
5	SK Direksi Tentang Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan Tabungan Arisan	21 Juni 2021
6	SK Direksi Tentang Modal Kerja Harian Bagi Teller Kantor Pusat dan Kantor Kas	30 Mai 2012
7	SOP Costumer Service	03 Oktober 2017
8	SK Direksi Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Sarana Kerja Harta Tetap dan Inventaris serta Persediaan Kantor (ATI)	28 Agustus 2017
9	SK Direksi Tentang Ketentuan Pembayaran Tunjangan Tidak Tetap	21 Juni 2021
10	SK Direksi Tentang Pengelolaan dan Kewenangan Kode (Sandi), Kunci Filling Cabinet dan Brankas pada Ruang Khasanah	29 Maret 2019
11	SK Direksi Tentang Perubahan Sandi Rekening Buku Besar pada Aplikasi Bank (Program)	12 Mai 2014
12	SK Direksi Tentang Peraturan Perusahaan	16 Februari 2023
13	SK Direksi Tentang Peraturan Kepegawaian	28 Juni 2012
14	SK Direksi Tentang Pembayaran Uang Pesangon	21 Juni 2021

	dan/atau Uang Penghargaan Kepada Direksi, Komisaris dan Karyawan	
15	SK Direksi Tentang Batasan Kewenangan untuk Melakukan Transaksi Tunai, Pemindah Bukuan dan Otorisasi Kepada Pejabat dan Pegawai	14 Mei 2012
16	SK Direksi Tentang Peraturan Disiplin Pegawai	13 Februari 2012
17	SK Direksi Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kredit Personal Intern (KPI) bagi Dekom,Direksi dan Karyawan	Februari 2021
18	SK Direksi Tentang Kebijakan Perjalanan Dinas pengurus dan Karyawan	25 Juli 2017
19	Keputusan Direksi Tentang Ketentuan Cuti dan Izin Bagi Karyawan	04 Januari 2017
20	SOP Penerapan Manajemen Resiko	13 Oktober 2017
21	SK Dewan Komisaris Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris	22 Juni 2015
22	SOP KREDIT HAPUS BUKU	28 Agustus 2017
23	SK Direksi Tentang Komite Kredit	30 Agustus 2022
24	SK Direksi Tentang Wewenang Memutuskan Kredit	31 Mei 2017
25	SK Direksi Tentang SOP Restrukturisasi Perkreditan	30 Oktober 2023
26	SK Direksi Tentang Penetapan Suku Bunga, Provisi, dan Administrasi Kredit	10 Maret 2014
27	SOP Kebijakan dan Prosedur Perkreditan	04 November 2019
28	SK Direksi Tentang Pengaturan Penggunaan Uang Panjar dan Uang Titipan	15 Februari 2010
29	SK Direksi Tentang Modal Kerja Harian Bagi Teller Kantor Pusat dan Kantor Kas	30 Mei 2012
30	SOP Penyelenggaraan Teknologi informasi	12 Desember 2017
31	SOP APU-PPT	29 Maret 2020
32	SK Direksi Tentang Pemberian Hadiah dan Bantuan	12 Juli 2016
33	SK Direksi tentang Kebijakan Pengelolaan User pada	26 Mei 2014

	Aplikasi Core Banking System	
34	SK Direksi tentang Ketentuan Kerja Lembur	21 Desember 2012
35	SOP AUDIT INTERN	13 Desember 2017
36	Kebijakan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)	Maret 2017
37	SK SOP Tabungan dan Deposito	11 Desember 2023
38	Ketentuan Tentang Penilaian Kinerja Karyawan	07 Mei 2018
39	Ketentuan tentang Beban Operasional dan Beban Non Operasional	25 April 2018
40	Ketentuan Tentang Kode Etik dan Perilaku Perusahaan	22 Oktober 2018
41	Ketentuan Tentang Rotasi Kerja Karyawan	17 Januari 2018
42	SK Direksi Tentang Perubahan Suku Bunga Tabungan dan Deposito Berjangka serta Biaya Administrasi Tabungan	20 Agustus 2023
43	SK Pembentukan Tim Khusus Kredit Bermasalah	12 Mei 2022
44	SK Pemberian Reward Penagihan Kredit Bermasalah	03 Maret 2023
45	SK Direksi Tentang Kebijakan Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy)	Oktober 2018
46	SK Direksi Tentang Kebijakan dan Prosedur (SOP) Layanan Pengaduan Nasabah	08 Juli 2019
47	SK Direksi tentang Kebijakan Kredit Pertanian dan Peternakan	30 Oktober 2023
48	SK SLIK	11 Desember 2023
49	SK Struktur dan Skala Upah	18 Desember 2023
50	SOP Tabungan dan Deposito Berjangka	11 Desember 2023
51	SOP Prosedur Perlindungan Konsumen Kebijakan	17 Januari 2024
52	Perkreditan BPR	12 Agustus
53	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Kualitas SDM	21 Agustus 2024
54	SK Audit Internal Berbasis Kepatuhan Resiko Dan TI	15 Januari 2024

55	SK APU PPT dan PPSPM	15 Januari 2024
56	SK PERLINDUNGAN KONSUMEN (Revisi)	17 Januari 2024
57	SK SOP Penggunaan Aplikasi BIS Mobile dengan Smart Mobile Posline	15 Maret 2024
58	SK Perhitungan IRA	10 Mei 2024
59	SK Kebijakan Perkreditan (Revisi)	12 Agustus 2024
60	SK Kredit Ketentuan Interen (Revisi)	13 Agustus 2024
61	SK SOP Pengembangan Kualitas SDM PT. BPR Ganto Nagari 1954	21 Agustus 2024
62	SK SOP Penanganan Pengaduan Konsumen	06 September 2024

1) Pedoman Kebijakan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Kepegawaian, sudah berkecukupan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun ada beberapa SOP yang perlu direvisi dan belum disosialisasikan secara penuh kepada semua karyawan, sedangkan untuk yang terkait dengan Perkreditan terutama SOP tentang Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit perlu dioptimalkan lagi pelaksanaannya dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan terutama karyawan yang di unit kerja kredit .
2) SOP Umum dan Operasional sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3) SOP PE Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko serta PE Internal Audit sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tinggal mengoptimalkan pelaksanaannya.

1. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPR Ganto Nagari 1954 :
   - **Hasil penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja dan jenjang organisasi pada PT BPR Ganto Nagari 1954**.
     Pelaksananaan fungsi kepatuhan, BPR telah membentuk dan membedakan antara pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksana kepatuhan. Pelaksana fungsi kepatuhan menujuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan cara kerjanya dibantu oleh PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Sedangkan untuk pelaksana kepatuhan, adalah Kabag Kredit sebagai Pemilik Risiko Kredit dan Kabag Operasional,Umum dan SDM sebagai pemilik Risiko Operasional.
     Dari hasil evaluasi kondisi pelaksana kepatuhan, BPR belum menetapkan secara jelas tentang Tugas dan Tanggung Jawab bagi Kabag Kredit sebagai Pemilik Risiko Kredit dan Kabag Operasional sebagai pemilik Risiko Operasional, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi pertanggung jawaban.

     - PELAKSANAAN PELATIHAN DAN SOSIALISASI KEPADA SELURUH UNIT KERJA TERKAIT.

DAFTAR SOSIALISASI DAN PELATIHAN
PT BPR Ganto Nagari 1954
SELAMA TAHUN 2024

No	Jenis Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta	Jumlah Peserta	Tempat
1	Sosialisasi Ketentuan BPR 2024	03/01/24	ALFIAN BURHANUDIN LISWARNI DELVIA SUSANTI	4 orang	Join Zoom Meeting
2	Pelatihan melakukan praktek & pelaporan Audit Intern penyelenggaraan TI BPR/BPRS	10-Jan-24	Liswarni	1orang	Rocky Plaza Hotel Padang
3	Bimtek Perpajakan	05-Feb-24	EDLINA JASMAN	1 orang	Whize Prime Hotel Padang
4	Strategi Anti Fraud Di BPR/BPRS	21-Feb-24	BURHANUDIN DELVIA SUSANTI	2 orang	Join Zoom Meeting
5	Undangan FGD " Efektivitas Penggunaan Innovative Credit Scoring (ICS) pada Jasa Lembaga Keuangan	04-Mar-24	ALFIAN	2 orang	Hotel Santika Premiere Padang
6	Undangan Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS dan Sosialisasi Ketentuan OJK	09 Maret 23 05-Mar-24	ZUARNI OEMAR ALFIAN SONI SUGITO	3 orang	Hotel ZHM Premiere Padang
7	Pelatihan Penerapan Metode dan Prinsip serta Pelaporan Appraisal Agunan Kredit BPR (Penilaian Agunan Kredit) Sesuai POJK No. 1 Tentang Kualitas Aset BPR Tahun 2024	07-08/03/2024	MANDRA FATRI ADE	1 orang	Rocky plaza Hotel Padang
8	Pelatihan Penyusunan SPO (Sistem Prosedur Operasional) Pengembangan SDM Sesuai POJK Th 2023 dan Pelaporan TW 1 Cetak Biru Pengembangan SDm	28-Apr-24	DELVIA SUSANTI	2 orang	Rocky plaza Hotel Padang
9	Pelatihan Penyusunan Individual Risk Assesment (IRA)	08-Mei-24	Lucy Elia Melda	1 orang	Join Zoom Meeting
10	Sosialisasi Pemindahan SLIK ke SLIK2.OJK.GO.ID	27-Mei-24	Lucy Elia Melda	1 orang	Hotel Santika Premier Padang
11	Bimbingan Teknis Penghapusan Fidusia guna terwujudnya	10-Jun-24	RIKHI AFDHAL	2 ora	Join Zoom Meeting

	kepastian hukum		Lucy Elia Melda	ng	
12	Sosialisai POJK penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS	13-Jun-24	ALFIAN BURHANUDIN LISWARNI DELVIA SUSANTI	2 orang	Join Zoom Meeting
13	Pelatihan Mengelola Aset BPR	20-Jun-24	SONI SUGITO	1 orang	Rocky Plaza Hotel
14	Konversi Penerapan SAKEP	03-04/ 07/2024	LISWARNI SONI SUGITO RIKHI AFDHAL	4 orang	Join Zoom Meeting
15	Sosialisasi Aplikasi Sprint Modul PKK BPR & BPRS	04-Jul-24	BURHANUDIN EDLINA JASMAN	2 orang	Rocky Plaza Hotel
16	Pelatihan Hypno Selling and Colection NLP	06-Jul-24	1. Pemasaran Tabungan dan Deposito 2. AO Kredit 3. Penagih Kredit	1 orang	Join Zoom Meeting
17	Pelatihan Hypno Selling and Colection NLP	16-Jul-24	DELVIA SUSANTI Lucy Elia Melda	2 orang	Join Zoom Meeting
18	Penanganan Kejahatan Siber termasuk Judi Online sebagai Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang	17-Jul-24	Lucy Elia Melda BURHANUDIN	2 orang	Join Zoom Meeting
19	Edukasi Penyampaian Laporan Keuangan Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis bagi lembaga Keuangan, Lembaga jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas lainnya Tahun 2024	18-Jul-24	Lucy Elia Melda	1 orang	Join Zoom Meeting
20	Evaluasi Kinerja BPR & BPRS dan Sosialisasi Ketentuan OJK	07-Agu-24	ALFIAN LISWARNI	2 orang	Rocky Plaza Hotel
21	Sosialisai terkait Sertifikat Elektronik	08-Agu-24	SONI SUGITO	1 orang	Join Zoom Meeting
22	Legal Workshop " Penguatan Kapasitas Hukum dan	18-Sep-24	SONI SUGITO YUDHI	2 ora	Hotel Santika Bukittinggi

	penyelesaian Kredit Bermasalah Bagi BPR/ BPRS"		PRIMANA	ng	
23	Undangan Pelatihan CKPN by Manual	19-Sep-24	SONI SUGITO LISWARNI Lucy Elia Melda	3 orang	Join Zoom Meeting
24	Pelatihan Penguatan Kualitas Manajemen Resiko Dan Tata Kelola Bagi BPR/BPRS	20-Sep-24	ALFIAN EDLINA JASMAN	2 orang	Join Zoom Meeting
25	Undangan dan Permohonan Dukungan Sosialisasi Program Premi Penjaminan LPs	02-Okt-24	ERNALENI DELVIA SUSANTI	2 orang	Zoom Meeting
26	Sosialisai dan Pengenalan Sertifikat Tanah Elektronik dan Pengamanannya	09-Okt-24	Bagian Kredit		Zoom Meeting
27	Pelatihan Penerapan Strategi Anti Fraud (Sesuai POJK No. 12 th 2024)	10-Okt-24	DELVIA SUSANTI	1 orang	Pangeran Beach Hotel Padang
28	Sosialisasi struktur Data APOLO Modul Profesi Keuangan AP/KAP	17-Okt-24	LISWARNI Lucy Elia Melda EDLINA JASMAN	3 orang	Pangeran Beach Hotel Padang
29	Undangan sosialisai Ketentuan Perbankan	07-Nov-24	ALFIAN LISWARNI EDLINA JASMAN DELVIA SUSANTI	4 orang	Zoom Meeting
30	Pelatihan Aspek Perkreditan BPR	12-Nov-24	ALEX ANGGARA ROLLI ARIATAMA	2 orang	Grand Basko Hotel Padang
31	Undangan Sosialisasi Skema Keagenan Korporasi BPJS Ketenagakerjaan	28-Nov-24	Lucy Elia Melda	1 orang	Grand Basko Hotel Padang
32	Sosialisasi Ketentuan Terkait Pengawasan Perilaku PUJK Edukasi & Perlindungan Konsumen bagi PUJK yang berkantor pusat di sumbar	04-Des-24	SONI SUGITO Lucy Elia Melda	2 orang	Pangeran Beach Hotel Padang

Pendidikan dan Pelatihan untuk Direksi dan karyawan selama tahun 2024 masih banyak dilakukan secara daring/online.

- **KAJI ULANG PENGKINIAN PEDOMAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR ATAU STANDAR OPERARASIONAL & PROSEDUR (SOP) SERTA BERBAGAI MOU MAUPUN PERIKATAN YANG DIJADIKAN ACUAN**

No	Aktivitas Fungsional Usaha	Jumlah Pengkinian	Ketidak Sesuaian Peraturan	Komitmen	Tindak Lanjut
1	Penghimpunan Dana • Tabungan • Deposito Berjangka • Simp. Bank Lain • Pinjaman Diterima	Nihil Nihil	Nihil Nihil Nihil	Nihil	
2	Penempatan Pd Bank Lain	Nihil	Nihil	Nihil	
3	Penyaluran Kredit	Nihil	Nihil	Nihil	
4	Pembukuan / Akuntansi	Nihil	Nihil	Nihil	
6	Teknologi Informasi	Nihil	nihil	Nihil	
7	Bagian Umum	Nihil	nihil	Nihil	
8	Bagian Personalia	Nihil	Nihil	nihil	
9	MOU	Nihil	Nihil	Nihil	
10	Berbagai Perikatan Kredit dan Agunan	Nihil	Nihil	Nihil	

Semua SOP dan Ketentuan Intern pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan , meskipun masih ada beberapa SOP yang sudah tidak sesuai dan harus direvisi lagi, sedangkan untuk struktur organisasi atau sumber daya manusia di BPR sudah cukup terpenuhi.

- **PENYIMPANGAN PERATURAN DAN UPAYA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN.**

No	Aktivitas Fungsional Usaha	Jenis Komunikasi & Koordinasi	Penyimpangan Peraturan	Tindak Lanjut
1	Penghimpunan Dana		Nihil	
2	Penempatan Bank Lain		Nihil	
3	Pemberian Kredit		Nihil	
4	Pembukuan / Akuntansi		Nihil	
5	Teknologi Informasi		Nihil	
4	Bagian Umum		Nihil	
5	Bagian Personalia		Nihil	

Selama tahun 2024 tidak ada terjadi pelanggaran. Untuk kedepannya fungsi kepatuhan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi mengenai

ketentuan,peraturan perusahaan serta sanksi atas pelanggarannya guna untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Serta fungsi kepatuhan berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan audit internal guna mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.

- **Pelaksanaan pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS.**

Daftar Lembaga Komitmen
PT BPR Ganto Nagari 1954
Selama Tahun 2024

No	Nama Lembaga	Dasar Komitmen	Materi Komitmen	Perkembangan Penyelesaian
1	OJK	POJK terkait Usaha BPR		Pada umumnya semua laporan sesuai aturan OJK sudah dipenuhi, meskipun masih ada beberapa laporan yang terlambat sehingga BPR dikenakan sanksi.
2	PPATK	Peraturan Kepala PPATK No PER-02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT)	-Laporan SIPESAT	Komitmen untuk Pelaporan data melalui program SIPESAT sudah dikirim dan diterima oleh PPATK
3	Kantor Pajak			Semua Komitmen PT BPR Ganto Nagari 1954 dengan Dirjen Pajak berupa Laporan-Laporan yang harus dikirim sudah dikirim sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
4	LPS			Komitmen PT BPR Ganto Nagari 1954 dengan LPS berupa Laporan Data Keuangan

				per Triwulan dan Pembayaran Premi LPS sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku
7	Pemda Kabupaten/Kota			
8	Pemda Provisi			
	dst			

Semua komitmen PT BPR Ganto Nagari 1954 terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya seperti BI, LPS dan PPATK sudah terpenuhi.

BAB IV

LAPORAN INSIDENTIL

Laporan insidentil selama tahun 2024 adalah NIHIL

BAB V

KESIMPULAN

1. Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan POJK NO. 4/POJK 03/2015 dan SE OJK No. 6/SE OJK 03/2016, walaupun masih terdapat pelaksanaan yang belum optimal.
2. Informasi umum PT BPR Ganto Nagari 1954 tentang penetapan struktur tata kelola sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan infra struktur pelaksana fungsi kepatuhan dan pelaksana kepatuhan belum berjalan dengan optimal.
3. Informasi mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan di PT BPR Ganto Nagari 1954 :
   a. Penerapan fungsi kepatuhan pada seluruh unit kerja dan jenjang organisasi pada PT BPR Ganto Nagari 1954 telah dilakukan secara inklusif dan tidak secara eklusif meskipun masih belum optimal.
   b. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk penjelasan atas upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, yakni selama tahun 2024 tidak ada terjadi pelanggaran atau tipi bank. Untuk kedepannya fungsi kepatuhan berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi mengenai ketentuan, peraturan perusahaan serta sanksi atas pelanggarannya guna untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran. Serta fungsi kepatuhan berkomitmen untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan audit internal guna mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan.
   c. Pemenuhan komitmen terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain seperti BI, PPATK, dan LPS telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun masih ada beberapa laporan pada OJK yang terlambat sehingga BPR dikenakan sanksi. Kedepannya diharapkan hal ini tidak terulang lagi.

d. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan telah dilaksanakan meskipun belum dilakukan secara optimal.

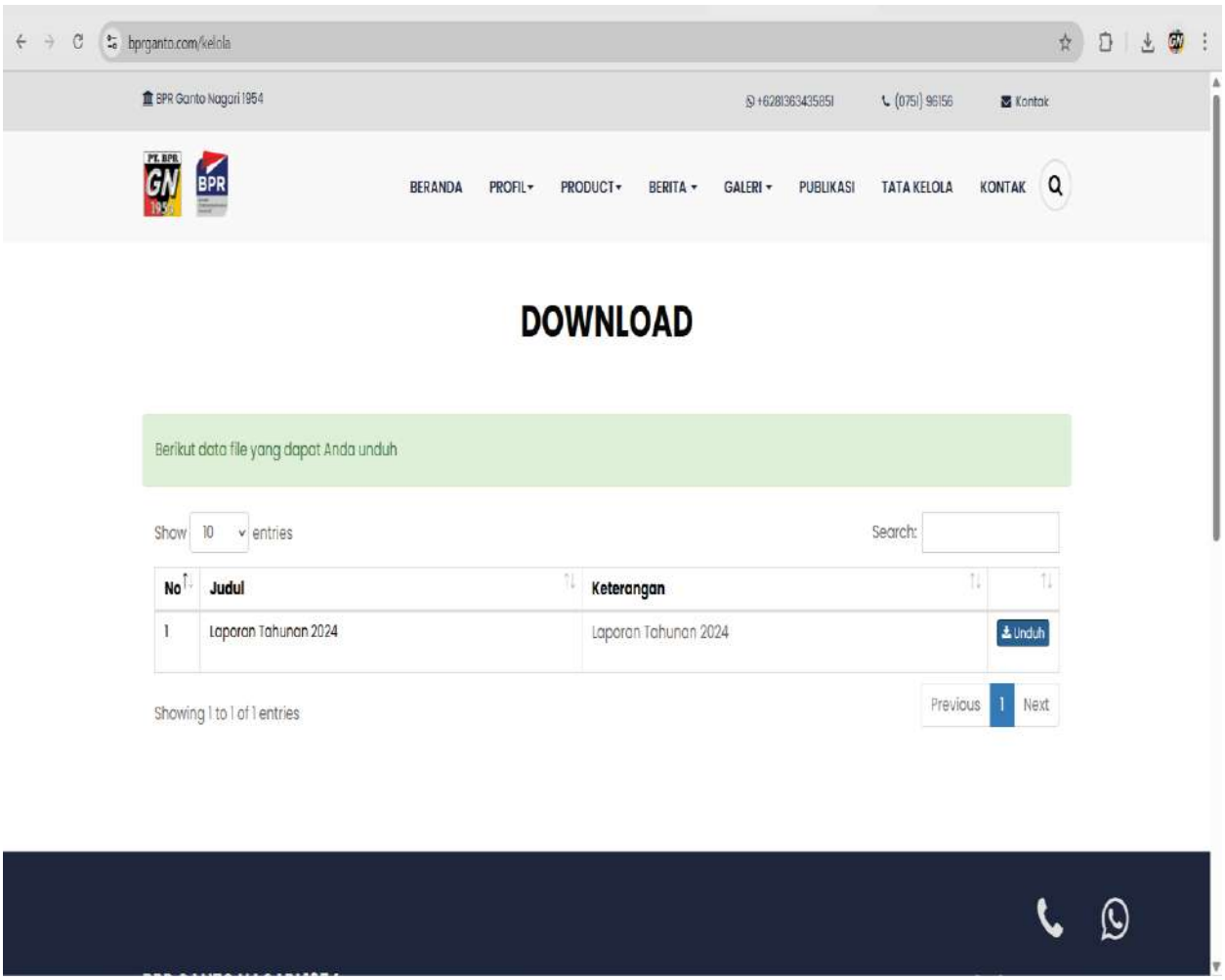
Demikian laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan.

Lubuk Alung, 30 Januari 2025
PT BPR Ganto Nagari 1954



BURHANUDIN
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko

Lampiran :
- *Struktur Organisasi*


bprganto.com/kelola
BPR Ganto Nagari 1954
+6281363435851
(0751) 96156
Kontak
BERANDA
PROFIL
PRODUCT
BERITA
GALERI
PUBLIKASI
TATA KELOLA
KONTAK
DOWNLOAD
Berikut data file yang dapat Anda unduh
Show 10 entries
Search:
No
Judul
Keterangan
1
Laporan Tahunan 2024
Laporan Tahunan 2024
Unduh
Showing 1 to 1 of 1 entries
Previous
1
Next